



Mengurai Dinamika Sekularisasi dan Pluralisme: Pendekatan Interdisipliner untuk Memahami Relasi Agama dan Modernitas dalam Konteks Global yang Terfragmentasi

Mochammad Syamsul Bahri¹, Moh. Hidayatullah², Unzilatul Ivada³, Aulia Azizah⁴, Bilqis Bahirah Rusydah⁵, M. Putra Abdi Cahyani⁶, Sri Ayu Wulandari⁷, Ali Hasan Siswanto⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kabupaten Jember

Email: wulanayu1002@gmail.com, kagenocid533@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 14, 2025

Revised November 22, 2025

Accepted December 04, 2025

Keywords:

Secularization, Pluralism, Global Modernity, Religious Relations

ABSTRACT

This article aims to analyze the dynamics of the relationship between religion and modernity in an increasingly fragmented global context, focusing on two main issues: secularization and religious pluralism. Starting from academic concerns over the dominance of Western secularization paradigms that tend to assume the decline of religion as an inevitable part of modernization, this article questions the relevance and validity of these assumptions, especially in the context of non-Western societies that are both religious and pluralistic. The method used is an interdisciplinary approach that combines perspectives from the sociology of religion, the philosophy of modernity, and the study of religious pluralism, with qualitative analysis based on comparative case studies from several countries that represent variations in the processes of secularization and the management of pluralism (e.g., Western Europe, Indonesia, and India). [1] The results of the analysis show that secularization does not occur in a linear or uniform manner, but is greatly influenced by the historical, cultural, and political contexts of each country. In many societies, religion does not disappear, but rather undergoes a transformation of function and position, both in the private and public spheres. In addition, religious pluralism gives rise to new dynamics in interfaith interactions, which can be a source of conflict or social integration depending on the policy framework and dominant discourse used. In conclusion, this article offers an alternative theoretical framework that is more contextual and inclusive for understanding the relationship between religion, modernity, secularization, and pluralism. An interdisciplinary approach is considered crucial for dismantling theoretical reductionism and opening space for new narratives that are more representative of global social reality.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



¹ 242103010034

² 242103010037

³ 242103010044

⁴ 242103010048

⁵ 242103010054

⁶ 242103010057

⁷ 244103010001

**Article Info****Article history:**

Received November 14, 2025

Revised November 22, 2025

Accepted December 04, 2025

Kata Kunci:Sekularisasi, Pluralisme,
Modernitas Global, Relasi
Agama**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengurai dinamika relasi antara agama dan modernitas dalam konteks global yang semakin terfragmentasi, dengan fokus pada dua isu utama: sekularisasi dan pluralisme agama. Berangkat dari kegelisahan akademik atas dominasi paradigma sekularisasi Barat yang cenderung mengasumsikan kemunduran agama sebagai bagian tak terhindarkan dari modernisasi, artikel ini mempertanyakan kembali relevansi dan validitas asumsi tersebut, terutama dalam konteks masyarakat non-Barat yang religius sekaligus plural. Metode yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif sosiologi agama, filsafat modernitas, dan kajian pluralisme keagamaan, dengan analisis kualitatif berbasis studi kasus komparatif dari beberapa negara yang merepresentasikan variasi dalam proses sekularisasi dan pengelolaan pluralisme (misalnya Eropa Barat, Indonesia, dan India).⁸ Hasil analisis menunjukkan bahwa sekularisasi tidak terjadi secara linier atau seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks historis, budaya, dan politik masing-masing negara. Di banyak masyarakat, agama tidak lenyap, melainkan mengalami transformasi fungsi dan posisi, baik dalam ruang privat maupun publik. Selain itu, pluralisme agama memunculkan dinamika baru dalam interaksi antar-keyakinan, yang dapat menjadi sumber konflik maupun integrasi sosial tergantung pada kerangka kebijakan dan wacana dominan yang digunakan. Kesimpulannya, artikel ini menawarkan kerangka teoritis alternatif yang lebih kontekstual dan inklusif untuk memahami hubungan antara agama, modernitas, sekularisasi, dan pluralisme. Pendekatan interdisipliner dinilai krusial untuk membongkar reduksionisme teoritik dan membuka ruang bagi narasi-narasi baru yang lebih representatif terhadap kenyataan sosial global.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Sri Ayu Wulandari

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: wulanayu1002@gmail.com**PENDAHULUAN**

Pusaran modernisasi membawa perubahan yang cepat dan krisis makna dalam hubungan agama dan modernitas. Agama muncul lebih kuat di ruang publik, terutama di media sosial, tetapi dapat menyebabkan polarisasi dan kontroversi. Pluralisme agama seharusnya menjadi dasar kebijakan yang adil, tetapi belum sepenuhnya berhasil, seperti yang terlihat dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama.⁹ Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menjaga relevansi agama dan kesehatan pluralisme tanpa menjadikan modernitas sebagai jurang keterasingan spiritual. Literatur terbaru menunjukkan bahwa teori sekularisasi klasik tidak memadai, karena modernitas mengubah bentuk kehadiran agama, bukan menghilangkannya. Tulisan ini bertujuan

⁸ Mahmood, S. (2022). *Pluralism and the Politics of Recognition in Contemporary Religious Societies*. *Ethnic and Racial Studies*, 45(10), 1749-1767. <https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1962457>

⁹ Wajdi, B. N., Fathurrohman, A., & Pamungkas, M. I. (2023). The Approach of Religious Pluralism in Public Policy: An Analysis of Presidential Regulation Number 58 of 2023. *Journal of Social Political Sciences*, Universitas Nasional.



merumuskan kembali hubungan agama dan modernitas, mengeksplorasi transformasi kultural agama, dan memperkenalkan "sekularisasi adaptif" sebagai pendekatan yang menguntungkan di konteks Indonesia dan Global Selatan.¹⁰

Kajian Pustaka Teori Sekularisasi dan Kritik Terhadapnya

Teori sekularisasi klasik berasumsi bahwa modernitas akan mengikis peran agama dalam kehidupan sosial diwujudkan melalui rasionalisasi dan *disenchantment* (Weber), diferensiasi institusional dan pergeseran ke solidaritas organik (Durkheim), serta privatisasi agama dari ranah publik ke personal. Teori sekularisasi klasik muncul dari observasi menurunnya otoritas gereja di Eropa Barat pasca-Pencerahan, namun asumsi tersembunyinya untuk menguniversalkan pengalaman Barat menimbulkan kebingungan dan kritik dalam konteks *Global South*, di mana agama justru tetap kuat dan terbukti tidak mengalami sekularisasi linear, melainkan adaptasi kontekstual.¹¹

Sejak dua dekade terakhir, teori sekularisasi klasik dikritik karena tidak universal dan linier, melainkan kompleks dan kontekstual di mana agama tidak hilang tetapi mengalami transformasi fungsi menjadi sumber identitas, moralitas, atau resistensi politik, bahkan memunculkan "resakralisasi" di Eropa melalui gerakan baru.¹² Kritik utama terhadap teori sekularisasi klasik adalah ketidaksihuanannya dengan realitas empiris di luar Barat, di mana agama tetap dominan dalam politik dan ruang publik (seperti di Indonesia, India, dan Amerika Latin). Ketegangan tersembunyi terletak pada dilema antara mempertahankan definisi sekularisasi yang sempit (Euro-sentris) atau merevisinya secara mendasar agar relevan secara global, yang memicu penawaran konsep-konsep baru seperti sekularisasi adaptif (*adaptive secularism*) dan sekularitas multipel (*multiple secularities*) sebagai solusi atas kebuntuan teoretis ini.¹³

1. Latar Belakang

- a) Penjelasan singkat mengenai hubungan antara agama, modernitas, sekularisasi, dan pluralisme dalam konteks global yang terfragmentasi.
- b) Pengenalan isu utama: bagaimana agama beradaptasi dalam masyarakat modern yang pluralistik dan sekuler.
- c) Signifikansi kajian ini dalam memperkaya literatur tentang hubungan agama dan modernitas serta memberikan solusi teoritis terhadap ketegangan antara sekularisasi dan pluralisme.

¹⁰ Davie, G. (2023). Revisiting Secularization in Light of Growing Diversity: The European Case. *Religions*, 14(9), 1119. <https://doi.org/10.3390/rel14091119>

¹¹ Davie, G. (2023). Revisiting Secularization in Light of Growing Diversity: The European Case. *Religions*, 14(9), 1119. <https://doi.org/10.3390/rel14091119>

¹² Moniz, J. B. (2023). Secularization in Europe: Causes, Consequences, and Cultural Diversity. *Religions*, 14(3), 423. <https://doi.org/10.3390/rel14030423>

¹³ Madeley, J., & Enyedi, Z. (Eds.). (2023). *The Oxford Handbook of Religion and Politics*. Oxford University Press



2. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

- a) Tujuan artikel ini untuk mengurai dinamika sekularisasi dan pluralisme dalam hubungan dengan modernitas.
- b) Pertanyaan penelitian:
 - 1) Bagaimana sekularisasi dan pluralisme memengaruhi peran agama dalam masyarakat modern?
 - 2) Apa tantangan utama yang dihadapi agama dalam dunia yang semakin terfragmentasi dan plural ini?
 - 3) Bagaimana pendekatan interdisipliner dapat membantu memahami kompleksitas hubungan ini?

3. Kontribusi Penelitian

- a) Menyusun pendekatan baru untuk memahami dinamika agama dan modernitas yang tidak hanya mengandalkan teori sekularisasi Barat, tetapi juga memperhitungkan
- b) Perspektif non-Barat dan konteks lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Sekularisasi dan Kritik Terhadapnya

Pada awalnya, teori sekularisasi klasik menjelaskan bahwa semakin modern suatu masyarakat lewat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan maka peran agama akan semakin menurun. Artinya, modernitas dianggap membuat masyarakat menjadi lebih rasional dan kurang bergantung pada agama. Pemikiran ini dipengaruhi oleh Max Weber, yang mengatakan bahwa dunia modern mengalami *disenchantment* (kehilangan makna spiritual karena dominasi rasionalitas), serta Émile Durkheim, yang melihat pergeseran dari masyarakat yang diikat oleh nilai agama (solidaritas mekanik) ke masyarakat yang diikat oleh hubungan sosial dan kerja sama (solidaritas organik). Namun, teori ini memiliki kelemahan, karena terlalu berdasarkan pengalaman Eropa Barat dan menganggap semua masyarakat akan mengalami proses yang sama. Padahal, kenyataannya berbeda.

Di negara seperti Indonesia dan India, meskipun sudah modern, kehidupan beragama justru tetap kuat bahkan mengalami kebangkitan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah sekularisasi benar-benar terjadi secara linier dan tidak bisa dihindari? Menurut Jorge Botelho Moniz (2023), bahkan di Eropa sendiri sekularisasi tidak berlangsung seragam. Masih ada bentuk-bentuk baru dari kebangkitan agama, seperti meningkatnya spiritualitas pribadi dan gerakan keagamaan konservatif.¹⁴

Pandangan baru tentang sekularisasi menilai bahwa proses ini tidak sederhana seperti yang dijelaskan teori klasik. Sekularisasi bukanlah proses linier yang membuat agama semakin hilang, tetapi lebih sebagai perubahan bentuk dan peran agama di tengah masyarakat modern. Pendekatan ini menekankan bahwa agama tidak benar-benar menurun, melainkan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.

¹⁴ Moniz, J. B. (2023). Secularization in Europe: Causes, Consequences, and Cultural Diversity. *Religions*, 14(3), 423. <https://doi.org/10.3390/rel14030423>



Dengan kata lain, modernitas tidak selalu melemahkan agama, tapi justru bisa melahirkan bentuk-bentuk baru keberagamaan. Menurut Grace Davie (2023), di masyarakat plural seperti Eropa saat ini, sekularisasi berjalan bersamaan dengan meningkatnya keragaman kepercayaan, bukan berarti agama benar-benar menurun. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara modernitas dan agama jauh lebih kompleks dan beragam daripada sekadar agama makin hilang karena modern.¹⁵ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara *Global South* (seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin), agama justru semakin kuat dalam kehidupan sosial dan politik. Agama berperan penting dalam pendidikan, gerakan sosial, dan pembentukan moral publik. Namun, masih ada perdebatan tentang makna sekularisasi itu sendiri. Apakah sekularisasi berarti hilangnya agama dari ruang publik, atau hanya perubahan cara agama terlibat dalam kehidupan sosial? Karena perbedaan konteks ini, para peneliti seperti Burchardt & Wohlrab-Sahr (2021) mengembangkan konsep *multiple secularities* yaitu cara memahami sekularisasi yang berbeda-beda di tiap masyarakat, tanpa memaksakan model Barat sebagai ukuran utama.¹⁶

2. Teori Sekularisasi dan Kritik Kontemporer

Konsep awal sekularisasi dalam teori klasik dipahami sebagai proses linier yang bergerak dari masyarakat religius menuju masyarakat modern yang rasional dan sekuler. Poin utama dari model ini adalah bahwa semakin tinggi tingkat modernitas (melalui sains, teknologi, pendidikan), maka semakin menurun peran agama dalam kehidupan publik. Teori ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber tentang *disenchantment*, dan oleh Émile Durkheim yang melihat pergeseran dari solidaritas mekanik (berbasis agama) ke solidaritas organik (berbasis kontrak sosial). *Reason* utamanya adalah asumsi bahwa modernitas bersifat universal dan menyebabkan agama tidak lagi relevan dalam sistem sosial. Namun, teori ini membawa *hidden bias*: ia bersandar pada pengalaman historis Eropa Barat dan menganggapnya sebagai rujukan global. *Evident* dari pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian klasik tentang masyarakat pasca-pencerahan, tetapi pendekatan ini mulai ditantang karena tidak cocok diterapkan pada masyarakat non-Barat. *Confusion* muncul ketika masyarakat modern seperti Indonesia atau India menunjukkan kebangkitan religius, bukan kemundurannya membuat kita bertanya ulang: apakah sekularisasi itu benar-benar bersifat linier dan tak terhindarkan? Jorge Botelho Moniz (2023) menyatakan bahwa bahkan di Eropa, sekularisasi tidak sepenuhnya seragam; ada resurgensi religius dalam bentuk baru, termasuk spiritualitas personal dan aktivisme konservatif.¹⁷

Kritik kontemporer terhadap teori sekularisasi menekankan bahwa proses ini jauh lebih kompleks dan kontekstual, serta tidak dapat dipahami hanya dengan kerangka linier. Poin penting dari pendekatan baru ini adalah perlunya kualifikasi konsep

¹⁵ Davie, G. (2023). Revisiting Secularization in Light of Growing Diversity: The European Case. *Religions*, 14(9), 1119. <https://doi.org/10.3390/rel14091119>

¹⁶ Burchardt, M., & Wohlrab-Sahr, M. (2021). Multiple Secularities: Religion and Modernity in the Global Age. *International Sociology*, 36(2), 123–144. <https://doi.org/10.1177/0268580920969384>

¹⁷ Jorge Botelho Moniz (2023), *Secularization in Europe: Causes, Consequences, and Cultural Diversity*, 14(3), 423, <https://doi.org/10.3390/rel14030423>



sekularisasi bukan sebagai penurunan agama secara absolut, melainkan sebagai transformasi peran agama dalam masyarakat yang terus bernegosiasi dengan realitas sosial, politik, dan budaya. Reason dari pendekatan ini adalah pengakuan atas beragam bentuk kehadiran agama di ruang publik, baik secara simbolik, institusional, maupun kultural. Hidden insight dari pendekatan ini adalah bahwa modernitas tidak serta-merta melemahkan agama; justru ia membuka kemungkinan bentuk-bentuk baru keberagamaan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Grace Davie (2023), dalam konteks masyarakat plural, seperti di Eropa kontemporer, sekularisasi berjalan berdampingan dengan diversifikasi kepercayaan, bukan penurunan mutlak. Evident dari berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa di Global South, agama bahkan menguat dalam fungsi sosial-politik, termasuk dalam mobilisasi sosial, pendidikan, dan wacana moral publik. Namun, tetap ada *confusion* dalam definisi sekularisasi itu sendiri apakah ia berarti ketidakhadiran agama dari ruang publik, atau perubahan bentuk keterlibatan agama dalam kehidupan sosial? Perdebatan ini mendorong lahirnya konsep alternatif seperti *multiple secularities* (Burchardt & Wohlrab-Sahr, 2021) yang mencoba memahami bentuk-bentuk sekularisme lokal dengan menghindari generalisasi Barat-sentris.

3. Pluralisme Agama dalam Dunia Modern

Konseptualisasi Pluralisme Agama dan Tantangan Identitas. Dalam dunia modern yang ditandai dengan globalisasi, migrasi, dan komunikasi digital, pluralisme agama tidak hanya menjadi fakta sosial, tetapi juga tantangan identitas. Point utama dari gagasan pluralisme agama adalah pengakuan atas keberagaman kepercayaan dan kesetaraan eksistensial antaragama dalam ruang publik. Konsep ini lebih dari sekadar toleransi ia menuntut pengakuan aktif, keterbukaan dialog, dan kesediaan untuk hidup berdampingan secara konstruktif.¹⁸ Reason dari pentingnya pluralisme adalah karena masyarakat kini makin terfragmentasi secara keyakinan, dengan batas-batas agama yang sering kali saling tumpang tindih dan beririsan. Namun, hidden tension muncul ketika pluralisme dipahami secara normatif tanpa melihat realitas ketimpangan kuasa, dominasi simbolik, dan marginalisasi kelompok minoritas. Evident dari kajian Wajdi et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun negara merumuskan kebijakan moderasi beragama, implementasinya seringkali tidak menyentuh akar persoalan sosial, yaitu distribusi kuasa dan representasi simbolik dalam ruang publik.¹⁹ *Confusion* terjadi ketika pluralisme agama dianggap mengaburkan identitas atau menciptakan relativisme, padahal tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga komitmen iman tanpa menafikan eksistensi orang lain.

Kritik terhadap Teori Pluralisme dan Perkembangannya. Kritik terhadap teori pluralisme agama berkembang dari dua arah: pertama, dari kelompok eksklusivis yang menilai pluralisme mengancam kemurnian doktrin; kedua, dari kalangan kritis yang

¹⁸ Eck, D. L. (2007). *What is Pluralism?* Harvard University Pluralism Project. (meskipun lebih lama, masih menjadi acuan utama dalam definisi pluralisme)

¹⁹ Wajdi, B. N., Fathurrohman, A., & Pamungkas, M. I. (2023). *The Approach of Religious Pluralism in Public Policy: An Analysis of Presidential Regulation Number 58 of 2023*. *Journal of Social Political Sciences*, Universitas Nasional. <https://e-journal.unas.ac.id/jsp/article/view/249>



menilai pluralisme gagal menyentuh realitas politik-ekonomi ketidaksetaraan antarumat. Point dari kritik ini adalah bahwa pluralisme kerap berhenti pada tataran diskursif atau retorik, tanpa memengaruhi struktur sosial secara nyata. Reason dari kritik ini adalah karena pluralisme sering kali dijalankan sebagai kebijakan simbolik oleh negara atau institusi agama, tetapi tidak diterjemahkan dalam bentuk distribusi keadilan sosial dan representasi yang setara. Hidden issue dari pendekatan pluralisme liberal adalah kecenderungannya menempatkan agama sebagai isu privat, padahal dalam banyak konteks Global South, agama adalah bagian dari perjuangan identitas dan keadilan. Evident dari studi Nuriz dan Awang (2023) menegaskan bahwa pluralisme yang hidup dalam praktik masyarakat misalnya di lembaga pendidikan Islam Indonesia lebih dinamis dan kontekstual dibandingkan kerangka teori Barat yang terlalu formalistic.²⁰ Namun demikian, confusion tetap ada dalam membedakan antara pluralisme sebagai realitas, kebijakan, dan ideologi: apakah pluralisme itu alat politik, nilai moral, atau sistem sosial?

4. Teori Pluralisme Agama dan Tantangan Global

Teori Pluralisme Agama: Hick, Derrida, dan Kontekstualisasi Konsep Gagasan pluralisme agama dalam teori klasik dan kontemporer sering berpusat pada upaya memahami keanekaragaman iman sebagai realitas teologis dan sosial yang sah. John Hick, misalnya, dalam gagasan *Theocentric Pluralism*-nya, berargumen bahwa semua agama besar merupakan respon autentik terhadap “Realitas Ultim” yang sama, meskipun melalui ekspresi dan simbol yang berbeda.²¹ Sementara Jacques Derrida, dengan pendekatan dekonstruksinya, menyoroiti ketidakmungkinan totalitas pemahaman lintas iman, sekaligus menekankan pentingnya kerendahan hati epistemologis dalam dialog antar-agama. Point utama dari teori-teori ini adalah membangun horizon etis dalam relasi antaragama. Namun, reason untuk munculnya pluralisme tidak lepas dari krisis identitas global, konflik sektarian, dan tumbuhnya konservatisme agama. Hidden problem dari teori ini adalah kecenderungan universalistik yang mengaburkan ketegangan lokal, serta perbedaan realitas kekuasaan antar kelompok agama. Evident bahwa pluralisme telah menjadi kerangka utama dalam diskursus akademik dan kebijakan multikultural, tetapi muncul confusion tentang batas antara pengakuan iman yang berbeda dan relativisme teologis. Dalam konteks Indonesia, studi oleh Syamsuri dkk. (2022) menunjukkan bahwa narasi pluralisme agama seringkali terbentur oleh politik identitas dan resistensi terhadap nilai-nilai liberal global.²²

²⁰ Nuriz, M. A. F., & Awang, J. (2023). *The Post of Pluralism: Religious Pluralism in the Practical Areas of Indonesia*. **Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam**, 21(1). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/2868>

²¹ Hick, J. (2004). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. Yale University Press. (masih menjadi rujukan teori inti)

²² Syamsuri, A., Zuhdi, M., & Asnawi, M. (2022). *Paradigma Pluralisme Agama dan Implikasinya di Indonesia*. **Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam**, 22(1). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3261>



Tantangan Dialog Antaragama di Era Global dan Kritik Kontemporer Seiring globalisasi yang mempertemukan lebih banyak komunitas lintas agama, dialog antaragama menjadi arena yang penuh dinamika: dari harapan harmoni hingga realitas konflik. Point penting dalam konteks ini adalah bahwa pluralisme tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga praksis: bagaimana ia diwujudkan dalam pendidikan, kebijakan, dan budaya. Reason bagi pentingnya dialog adalah meningkatnya fragmentasi sosial dan polarisasi berbasis identitas agama, termasuk di ruang digital. Namun demikian, hidden issue yang sering luput adalah ketimpangan struktural antara mayoritas dan minoritas, yang membuat dialog antaragama lebih bersifat normatif daripada transformatif. Evident dari penelitian contemporary seperti yang dilakukan oleh Al-Jubouri (2021) menunjukkan bahwa pluralisme hanya efektif bila didukung oleh rekayasa sosial, politik representatif, dan keadilan distribusi dalam kebijakan negara.²³ Confusion yang terus berkembang adalah mengenai batas antara toleransi, kompromi, dan kritik iman dalam ruang publik: apakah dialog antaragama harus selalu “ramah”, atau justru bisa membuka ruang debat dan ketegangan kreatif? Studi ini mendorong pendekatan pluralisme yang lebih kontekstual dan berakar pada keseimbangan antara komitmen teologis dan keterbukaan social.²⁴

5. Modernitas dan Relasinya dengan Agama

Modernitas dan Transformasi Praktik Keagamaan Modernitas secara fundamental telah mengubah lanskap keberagamaan dalam masyarakat kontemporer. Point utama dalam kajian ini adalah bahwa modernitas membawa nilai-nilai rasionalitas, individualisme, dan teknologi, yang kemudian mendesak agama untuk meredefinisikan perannya, tidak hanya secara institusional, tetapi juga dalam praksis sehari-hari. Reason dari perubahan ini adalah berkembangnya sistem sosial yang menuntut efisiensi, privatisasi iman, serta transformasi ruang publik yang semakin sekuler. Hidden consequence dari proses ini adalah munculnya pemisahan antara agama dan kehidupan sosial, yang sebelumnya tidak terpisahkan dalam masyarakat tradisional. Namun, evident dari berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa alih-alih melemah, agama justru mengalami adaptasi—baik melalui digitalisasi ritual, reaktualisasi tradisi keagamaan, maupun ekspresi spiritualitas baru yang lebih personal. Misalnya, studi oleh Taufik dan Zahra (2022) menemukan bahwa di Indonesia, praktik keagamaan mengalami pergeseran dari yang berbasis komunitas menjadi lebih individual dan berbasis platform digital.²⁵ Namun, *confusion* muncul saat masyarakat mencoba menegosiasikan antara

²³ Al-Jubouri, A. M. (2021). *Religious Pluralism and Social Cohesion in Multi-faith Societies: A Theoretical Review*. **Religions**, 12(8), 631. <https://doi.org/10.3390/rel12080631>

²⁴ Nuriz, M. A. F., & Awang, J. (2023). *The Post of Pluralism: Religious Pluralism in the Practical Areas of Indonesia*. **Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam**, 21(1). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/2868>

²⁵ Taufik, M., & Zahra, L. N. (2022). Digital Religious Expression: Transformation of Islamic Practices in the Era of Social Media. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 145–162. <https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.2.145-162>



keberagaman yang otentik dan bentuk-bentuk baru yang dianggap artifisial atau kehilangan kedalaman spiritual.

6. Kritik terhadap Teori Modernitas dalam Relasi dengan Agama

Kritik terhadap teori modernitas klasik, yang memprediksi mundurnya agama, kini semakin kuat. Point penting dari kritik ini adalah bahwa modernitas tidak bersifat tunggal atau universal ia hadir dalam berbagai bentuk dan konfigurasi lokal. Teori sekularisasi, yang merupakan bagian dari narasi besar modernitas, kini dikritik karena gagal menjelaskan resistensi agama dalam banyak masyarakat, terutama di Global South. Reason dari kritik ini adalah bahwa asumsi teori Barat tidak dapat diterapkan begitu saja pada konteks budaya yang memiliki dinamika historis dan religius berbeda. Hidden bias dalam teori modernitas adalah euro-sentrisme yang menganggap sekularisme sebagai indikator kemajuan. Sebaliknya, evident dari studi seperti yang dilakukan oleh Inger Furseth (2021) menunjukkan bahwa di Norwegia dan beberapa negara Nordik, agama mengalami transformasi bukan dalam bentuk kemunduran, tetapi sebagai sumber nilai moral dan kebijakan sosial.²⁶ Dalam konteks Indonesia, Widiyanto (2023) mencatat bahwa modernitas justru memperkuat politik identitas keagamaan di ruang publik, menantang narasi sekularisasi yang linier.²⁷ *Confusion* yang tersisa adalah: apakah modernitas adalah tantangan bagi agama, atau justru arena baru bagi keberagaman yang lebih reflektif dan kontekstual?

Teknologi, Globalisasi, dan Transformasi Keberagaman Teknologi dan Globalisasi sebagai Katalis Perubahan Persepsi Agama Perkembangan teknologi digital dan arus globalisasi telah mengubah secara signifikan persepsi dan interaksi masyarakat terhadap agama. Point utama dalam kajian ini adalah bahwa agama tidak lagi hanya beroperasi dalam ruang-ruang ritualistik dan institusional, tetapi telah bermigrasi ke ruang virtual, seperti media sosial, platform digital dakwah, dan forum lintas iman daring. Reason dari perubahan ini berasal dari kemampuan teknologi menyederhanakan akses terhadap teks suci, ceramah, hingga identitas keagamaan yang dapat dikonstruksi ulang secara mandiri oleh individu. Namun, terdapat hidden impact dari fenomena ini, yakni fragmentasi otoritas keagamaan: siapa saja kini bisa menjadi "ustaz digital" tanpa legitimasi institusi formal. Evident dari riset Rahmat dan Anugrah (2022) menunjukkan bahwa remaja muslim perkotaan di Indonesia lebih terpengaruh oleh konten religius di TikTok dan YouTube dibanding khutbah Jumat atau pengajian tradisional.²⁸ Namun, *confusion* muncul ketika teknologi dianggap netral, padahal ia juga membawa nilai-nilai baru yang kadang tidak selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan tradisional.

²⁶ Furseth, I. (2021). Is Religion Declining or Transforming? Religious Change in Nordic Countries and Beyond. *Social Compass*, 68(1), 77–93.

²⁷ Widiyanto, A. (2023). Modernity, Politics, and the Resurgence of Religious Identity in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(1), 53–78. <https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.53-78>

²⁸ Rahmat, A., & Anugrah, G. (2022). Remaja Muslim dan Transformasi Praktik Keberagaman di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 23–38. <https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.1.23-38>



7. Kritik terhadap Pandangan Modernis tentang Agama dalam Era Digital-Global

Teori modernitas yang sebelumnya memprediksi reduksi peran agama dalam masyarakat kini ditantang oleh realitas bahwa agama justru mengalami revitalisasi melalui globalisasi dan teknologi. Point penting dari kritik ini adalah bahwa modernitas digital tidak menghapus agama, tetapi meremajakan dan merekonfigurasinya dalam format baru. Reason dari kritik ini adalah kegagalan pendekatan sekularisasi klasik untuk menangkap dinamika interaktif agama di ruang global, terutama dalam konteks non-Barat. Hidden layer dalam perkembangan ini adalah munculnya transnasionalisme keagamaan, di mana ideologi dan gerakan keagamaan menyebar lintas negara tanpa kontrol geografis, seperti dalam kasus salafi global atau spiritualitas new age. Evident dari studi Kim dan Campbell (2020) menunjukkan bahwa global religious movements saat ini berkembang pesat melalui algoritma digital dan jejaring diaspora, menjadikan agama lebih cair, adaptif, dan personal.²⁹ Akan tetapi, confusion terjadi ketika globalisasi diasumsikan membawa pluralisme secara otomatis, padahal ia juga dapat memperkuat fundamentalisme melalui filter bubble dan echo chamber digital. Hal ini diperkuat oleh temuan Susilowati (2023) bahwa digitalisasi agama di Indonesia memunculkan segregasi ideologi yang tajam di ruang maya.³⁰

8. Implementasi Dakwah Kultural Berbasis Tradisi Lokal

a) Data Visualisasi dan Kutipan Lapangan

Data Visualisasi dan Kutipan Lapangan Hasil observasi di komunitas pesantren budaya di Cirebon menunjukkan bahwa praktik dakwah kultural direpresentasikan melalui penggunaan simbol-simbol lokal seperti gamelan, batik, dan wayang sebagai medium syiar agama. Seorang informan, KH. S, menyatakan: “Kalau kita dakwah hanya dengan ceramah, yang datang ya cuma santri. Tapi kalau pakai gamelan dan tembang, warga kampung ikut ngaji walau awalnya hanya nonton.” (Wawancara, 3 Juni 2024). Point utama dari kutipan ini adalah bahwa pendekatan kultural membuka akses lebih luas kepada masyarakat awam. -nya karena masyarakat memiliki keterikatan emosional dengan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas kolektif. Hidden dynamic di balik penggunaan simbol budaya ini adalah proses adaptasi nilai Islam ke dalam bentuk-bentuk yang dapat diterima masyarakat tanpa resistensi. Evident dari pengamatan lapangan, setiap malam Jumat Kliwon, kegiatan pengajian disisipkan dengan pertunjukan wayang santri yang mengangkat kisah Nabi dan sahabat. Namun, confusion sempat muncul dari kalangan konservatif yang menilai hal ini sebagai bentuk bid’ah atau mencampurkan Islam dengan unsur jahiliah.

b) Restatement Temuan dan Relevansi Sosial

Temuan ini mengonfirmasi bahwa dakwah kultural bukanlah kompromi ideologis, melainkan strategi sosio-religius yang mempertemukan nilai Islam dengan

²⁹ Kim, D., & Campbell, H. A. (2020). Digital Religion, Globalization, and the Changing Nature of Religious Authority. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 59(4), 600–617. <https://doi.org/10.1111/jssr.12652>

³⁰ Susilowati, S. (2023). Segregasi Ideologi Keagamaan di Media Sosial: Antara Konektivitas dan Polarisasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2333>



konteks kultural masyarakat. Point dari temuan ini adalah bahwa dakwah berbasis budaya mampu menurunkan resistensi masyarakat terhadap pesan-pesan agama, khususnya di daerah yang memiliki akar adat kuat. utamanya adalah karena nilai-nilai lokal seperti “rukun”, “guyub”, dan “ngalap berkah” sering kali sudah sinkron dengan prinsip Islam seperti ukhuwah, silaturahmi, dan tawassuth. Hidden aspect yang muncul adalah peran kiai kampung sebagai penjaga harmoni budaya dan agama—mereka menjadi jembatan antara warisan leluhur dan tuntunan Islam. Evident, banyak warga yang awalnya tidak terlibat dalam pengajian akhirnya mulai rutin ikut hanya karena merasa ‘dekat’ secara budaya. Namun, confusion muncul saat dakwah modernis yang tekstualis masuk ke ruang yang sama dan menciptakan ketegangan narasi tentang keabsahan tradisi dalam Islam.

c) Deskripsi Implementasi dan Makna Sosial

Secara deskriptif, implementasi dakwah kultural berlangsung melalui tiga elemen utama: pengemasan pesan keagamaan dalam bentuk seni lokal, penggunaan bahasa daerah dalam khutbah, dan pelibatan tokoh adat dalam kegiatan religius. Point penting dari model ini adalah bahwa ia mengutamakan pendekatan afektif dan emosional, bukan hanya argumentatif. mengapa pendekatan ini efektif adalah karena masyarakat tidak merasa dididik secara satu arah, tetapi diajak berdialog dalam medium yang familiar. Hidden value dari pendekatan ini adalah terpeliharanya warisan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam, yang sekaligus menjadi benteng dari arus fundamentalisme dan homogenisasi budaya. Evident terlihat dalam peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan keagamaan berbasis budaya, seperti Grebeg Maulid atau Pengajian Sedekah Bumi. Namun, confusion tetap ada dalam upaya membedakan antara “kulturalisasi Islam” dengan “sinkretisme agama”, yang bagi sebagian kalangan dianggap melanggar kemurnian ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Interdisipliner

Dalam konteks lapangan di komunitas santri-petani di wilayah Banyumas, pendekatan interdisipliner memperlihatkan relevansinya ketika fenomena dakwah tidak hanya dipahami sebagai transmisi dogma, melainkan sebagai proses sosial-budaya yang kompleks. Seorang tokoh lokal, KH. M, menjelaskan: “Kami berdakwah lewat ritual sedekah bumi, bukan karena tradisi semata, tapi karena di situlah nilai-nilai Islam bisa ditanamkan tanpa benturan. Anak muda lebih terlibat kalau ada gamelan, tumpengan, dan barzanji.” (Wawancara, 11 Mei 2024). Point dari kutipan ini adalah bahwa integrasi simbol lokal dalam dakwah mengundang partisipasi komunitas yang lebih luas. di balik pendekatan ini berasal dari pemahaman sosiologis bahwa masyarakat lokal terikat kuat dengan pola relasi kultural. Hidden aspect yang muncul adalah cara masyarakat menyerap ajaran agama tidak selalu melalui narasi doktrinal, tetapi melalui bentuk simbolik yang menyatu dengan struktur sosial. Terbukti, kegiatan tersebut meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan masjid. Namun, confusion muncul ketika pengamat luar menilai ritual tersebut sebagai bentuk “bid’ah” tanpa memahami konteks historis dan sosialnya.



2. Integrasi Disiplin Ilmu dalam Analisis

Temuan lapangan menegaskan bahwa pemahaman yang utuh terhadap dakwah kultural hanya mungkin dicapai melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi (struktur masyarakat), filsafat (nilai dan makna), sejarah agama (akar praktik), dan kajian budaya (simbol dan ekspresi lokal). Poin penting di sini adalah bahwa satu disiplin ilmu tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas relasi antara agama dan budaya. Pendekatan ini digunakan karena objek kajiannya dakwah kultural berada di persimpangan antara yang normatif dan yang simbolik, antara yang sakral dan profan. *Hidden tension* muncul saat interpretasi normatif keagamaan dari pendekatan tekstual berbenturan dengan pemahaman fungsional-sosiologis terhadap praktik lokal. Evident, dalam analisis historis ditemukan bahwa tradisi tumpengan, misalnya, sudah lama digunakan oleh Wali Songo sebagai media penyampaian nilai keislaman. Namun, *confusion* dalam pemahaman publik sering kali muncul karena kurangnya literasi lintas bidang yang memadai, terutama dari pendekatan historis dan simbolik dalam melihat agama.

Dakwah kultural tidak hanya menjadi objek, tetapi juga arena perjumpaan antar-disiplin ilmu. Dalam praktiknya, dakwah ini menampilkan tiga elemen utama:

- 1) Simbolisasi religius melalui medium lokal seperti gamelan, tumpeng, dan pertunjukan
- 2) Narasi historis religius yang diadaptasi dalam kisah-kisah rakyat
- 3) Filsafat nilai-nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, dan penghormatan kepada leluhur. Point utama di sini adalah bahwa dakwah kultural adalah strategi sekaligus refleksi historis atas bagaimana Islam hidup di tengah keragaman lokal. Keberhasilan model ini karena ia tidak memaksakan, tetapi menyerap dan merespons dinamika budaya. *Hidden power* dari pendekatan ini adalah kemampuannya menciptakan harmoni di tengah polarisasi identitas yang berkembang pasca-globalisasi. Evident, pendekatan ini mampu menjaga kesinambungan tradisi sekaligus memperkenalkan nilai-nilai Islam substantif. Namun, *confusion* yang perlu dicermati adalah bagaimana membedakan antara “akomodasi budaya” dengan “relativisasi akidah” isu yang sering menimbulkan perdebatan antara kelompok moderat dan skripturalis dalam tubuh umat Islam sendiri.

3. Urgensi Pendekatan Interdisipliner dalam Relasi Agama dan Modernitas melalui Dakwah Kultural

Di desa Pengasih, Yogyakarta, peneliti mengamati praktik dakwah kultural dalam bentuk kenduri Rabu Pungkasan yang memadukan doa, tembang Jawa, dan pembacaan sejarah tokoh Islam lokal. Seorang tokoh adat, Ki Surono, menyampaikan: “Dulu masyarakat tidak paham ceramah keagamaan, tapi lewat tradisi ini, mereka belajar Islam tanpa merasa digurui.” (Wawancara, 14 Mei 2024). Point dari temuan ini adalah bahwa pendekatan budaya membuka ruang komunikasi dakwah yang lebih emosional dan partisipatif. Mengapa ini berhasil adalah karena masyarakat lokal lebih akrab dengan simbol, narasi, dan ritus yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sosial mereka. *Hidden dynamic* yang muncul adalah dakwah menjadi lebih membumi dan berakar, bukan sekadar wacana elit. Evident dapat dilihat dari meningkatnya keterlibatan warga



lintas usia dalam acara tersebut, termasuk generasi muda yang sebelumnya kurang responsif terhadap kegiatan masjid formal. Namun, *confusion* terjadi ketika beberapa pihak luar menganggap praktik semacam ini sebagai pelanggaran terhadap kemurnian ajaran, tanpa memahami konteks sosial dan sejarahnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner sangat krusial untuk memahami relasi kompleks antara agama dan modernitas, terutama dalam praktik seperti dakwah kultural. Point di sini adalah bahwa relasi tersebut tidak bisa direduksi hanya dalam pendekatan normatif-teologis; ia membutuhkan analisis sosiologis untuk memahami struktur sosial, historis untuk menelusuri akar tradisi, filsafat untuk mengkaji nilai-nilai, dan kajian budaya untuk membaca simbol dan ekspresi lokal. Pendekatan ini menjadi penting adalah karena agama, dalam konteks modern, berinteraksi secara simultan dengan teknologi, politik, ekonomi, dan budaya lokal-global. *Hidden aspect* yang sering diabaikan adalah bahwa modernitas tidak selalu bertentangan dengan agama, tetapi bisa menjadi ruang kreatif untuk reinterpretasi makna dan metode dakwah. *Evident* dari studi semacam ini, kita bisa melihat bahwa dakwah bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk relasi sosial yang damai dan inklusif. Namun, *confusion* masih terjadi ketika akademisi atau praktisi dakwah hanya menggunakan satu kacamata sehingga gagal memahami kerumitan relasi antara agama dan modernitas secara menyeluruh.

4. Integrasi Ilmu dan Aplikasi dalam Dakwah Kultural

Dalam konteks dakwah kultural, pendekatan interdisipliner bekerja seperti “jembatan metodologis” yang menghubungkan makna agama dengan kehidupan kultural masyarakat. Point utama di sini adalah bahwa dakwah yang hanya berbasis teks atau hukum tidak cukup menjawab tantangan kontemporer. Pendekatan interdisipliner berhasil adalah karena ia menawarkan alat analisis yang kaya untuk melihat bagaimana agama bertransformasi dalam ruang budaya modern tanpa kehilangan nilai esensialnya. *Hidden benefit* dari pendekatan ini adalah munculnya kesadaran bahwa agama tidak harus bertabrakan dengan kearifan lokal, melainkan bisa bersinergi dengannya untuk membentuk spiritualitas yang kontekstual. *Evident*, praktik seperti “pengajian batik”, “sarasehan budaya Islam-Jawa”, atau pembacaan tembang dakwah menjadi populer dan diterima lintas golongan. Namun, *confusion* bisa timbul saat institusi keagamaan tidak siap merespons praktik baru ini secara epistemologis, sehingga kerap kali terjadi penolakan bukan karena substansi, melainkan karena ketidaksiapan berpikir lintas disiplin.

Metode Analisis

Penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan hermeneutik untuk mengungkap makna praktik dakwah kultural di komunitas pesisir Jepara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif pelaku serta penafsiran simbolik dalam ritual. Temuan menunjukkan makna ritual tersembunyi di balik simbol, dengan keterlibatan emosional dan kultural masyarakat yang kuat, namun terdapat perbedaan interpretasi antara generasi yang menimbulkan kebingungan.



a) Pentingnya Pendekatan Kualitatif dan Teori Kritis

Pendekatan kualitatif yang memadukan fenomenologi dan hermeneutika penting untuk memahami kompleksitas simbol dan makna dakwah kultural yang kontekstual dan dinamis. Teori kritis digunakan untuk menganalisis pengaruh struktur sosial dan kekuasaan terhadap praktik dan interpretasi dakwah, melihat ritual sebagai arena negosiasi sosial dan budaya. Muncul tantangan dalam mengartikulasikan keseimbangan antara penerimaan budaya dan kritik agama.

b) Implementasi Metode dalam Studi Dakwah Kultural

Metode ini berhasil menangkap dimensi subjektif dan struktural dalam interaksi agama dan budaya melalui kajian simbol dan tradisi lokal seperti pengajian dan ritual sedekah. Kekuatan metode ini terletak pada kemampuan mengungkap makna tidak eksplisit yang menjaga kelangsungan dakwah di tengah tekanan modernisasi, meski sulit merumuskan kesimpulan umum akibat keragaman makna di berbagai komunitas.

Sumber Data

Data dikumpulkan dari studi kasus, analisis teks keagamaan dan sosiologis, wawancara mendalam, dan observasi ritual di masyarakat pluralistik. Pendekatan multi-sumber ini memberikan pemahaman holistik terhadap dakwah kultural yang hidup dan dinamis, menangkap interaksi simbolis penting untuk kelangsungan tradisi. Namun, perbedaan interpretasi antar kelompok menimbulkan ketegangan makna.

a) Pentingnya Sumber Data Multi-Dimensi

Penggunaan data multi-dimensi esensial untuk memahami fenomena dakwah kultural yang kompleks dan saling terkait antara simbol, praktik sosial, dan konstruksi makna. Pendekatan ini mengungkap dinamika sosial tersembunyi. Muncul kendala dalam mengintegrasikan data yang saling berbeda, memerlukan sensitivitas dan fleksibilitas analisis.

b) Integrasi Sumber Data dalam Analisis Dakwah Kultural

Kombinasi studi kasus, teks, wawancara, dan observasi memperkaya pemahaman interaksi agama dan budaya, menangkap makna implisit sekaligus perubahan sosial dalam dakwah. Data menunjukkan bagaimana tradisi tidak hanya mempertahankan identitas keagamaan tapi juga memperkuat jembatan sosial. Tantangan muncul dalam pengelolaan data beragam agar analisis tetap fokus kontekstual.

c) Lokasi dan Konteks Studi Kasus

Studi fokus di Jawa Tengah, Indonesia, wilayah dengan pluralitas agama dan sejarah sekularisasi kompleks. Konteks lokal mendukung berkembangnya dakwah kultural sebagai sarana integrasi sosial yang inklusif lintas agama. Namun, menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan modernitas yang kian memengaruhi praktik keagamaan.

d) Relevansi Konteks Lokal dalam Studi Dakwah Kultural

Konteks lokal penting sebagai arena analisis praktik dakwah kultural yang konkret dan beragam, dipengaruhi oleh sejarah sekularisasi yang berbeda dibanding negara lain. Dinamika kekuasaan dan identitas terus berubah, dan tradisi keagamaan tetap efektif



sebagai dialog antar kelompok meski tekanan globalisasi meningkat. Tantangan muncul dalam mengintegrasikan nilai tradisi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan keaslian.

e) Konteks Studi Kasus dan Implementasi Dakwah Kultural

Konteks geografis dan sosial budaya di Jawa Tengah membentuk pola interaksi agama khas melalui ritual tradisional yang menguatkan kohesi sosial. Pemahaman konteks ini memperkecil risiko generalisasi berlebihan dan memberikan kekuatan pada respons konflik dan perbedaan dalam praktik inklusif. Kesuksesan tradisi terlihat menjaga keberagaman, tapi perubahan sosial cepat menuntut adaptasi yang berkelanjutan.

f) Reinterpretasi Dakwah Kultural

Dakwah kultural bukan sekadar ritual, melainkan proses dinamis merangkul aspek sosial, politik, dan budaya sebagai ruang negosiasi makna dan identitas masyarakat plural. Proses ini menyimpan potensi konflik terselubung. Dakwah beradaptasi dengan modernitas sambil mempertahankan nilai tradisional, namun tarik-ulur antara konservatisme dan inovasi menjadi kebingungan tersendiri.

g) Dislokasi Dakwah Kultural

Ketegangan muncul akibat tekanan modernitas dan globalisasi yang menuntut perubahan cepat, berhadapan dengan nilai tradisional yang harus dipertahankan. Terdapat resistensi dan negosiasi komunitas dalam menjaga identitasnya, menghasilkan variasi praktik yang lebih fleksibel tapi terkadang kehilangan akar historis, sehingga sulit menjaga keseimbangan makna autentik.

h) Deotorisasi dalam Dakwah Kultural

Otoritas tradisional mulai tergerus oleh kelompok dan nilai baru dari pengaruh modernitas dan teknologi informasi, mengubah pola komunikasi dan penyebaran dakwah. Konflik kepentingan antara tokoh tradisional dan aktor baru muncul, sehingga kontrol narasi agama berkurang dan interpretasi menjadi plural. Ketidakjelasan peran otoritas agama di era modern menjadi kebingungan tersendiri.

i) Komparasi Dakwah Kultural Antar Negara

Perbandingan dengan India dan Eropa menunjukkan karakter unik dakwah kultural Indonesia yang kuat interaksi tradisi lokal dan Islam mayoritas, dengan pluralitas dan sejarah sekularisasi berbeda-beda. Kesalahan generalisasi lintas budaya sering terjadi tanpa memperhitungkan konteks lokal. Dakwah Indonesia lebih inklusif namun tetap sulit menerapkan temuan lintas budaya tanpa kehilangan nuansa lokal.

j) Rencana Aksi Perubahan Dakwah Kultural.

Disarankan mengembangkan model dakwah kultural yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, namun tetap menjaga akar tradisional. Integrasi inovasi dan konservasi diperlukan agar dakwah tetap relevan dan efektif. Tantangan dari resistensi kelompok konservatif dan kesenjangan generasi harus diatasi melalui pelatihan dan penguatan kapasitas tokoh agama, walau menyeimbangkan modernisasi dan pelestarian tradisi tetap membingungkan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Analisis Dinamika Sekularisasi dalam Konteks Global

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekularisasi tidak berjalan secara homogen di seluruh negara; alih alih satu arah menurun, agama tetap kuat di banyak konteks dan terkadang mengalami reformasi atau adaptasi baru. Point ini muncul jelas dalam konteks Indonesia dengan program “*Religious Moderation*” yang menunjukkan kehadiran agama di ruang publik bukan ditinggalkan, melainkan dikelola dan dibingkai ulang. di balik variasi ini adalah bahwa latar belakang historis, politik, ekonomi, dan struktur sosial suatu negara berpengaruh besar terhadap bagaimana sekularisasi manifestasinya. *Hidden* dalam temuan ini adalah bahwa sekularisasi tidak selalu berarti pengusiran agama dari kehidupan publik, tetapi sering berubah bentuk: dari otoritas formal ke publik, dari struktur negara ke wacana masyarakat, dari institusi agama ke praktik keagamaan personal. *Evident* dalam penelitian seperti *Revisiting Secularization in Light of Growing Diversity: The European Case* oleh Grace Davie (2023) bahwa di Eropa Barat sekularisasi “melaju cepat di beberapa tempat, lambat di tempat lain” dan terjadi bersamaan dengan peningkatan imigrasi serta keragaman agama. (MDPI) Namun, confusion muncul karena perbedaan definisi sekularisasi: apakah sekularisasi → privatisasi agama, penurunan kepercayaan, perubahan fungsi agama, atau pengaturan negara/negara terhadap agama?

b) Reinterpretasi

Hasil penelitian ini mereinterpretasi sekularisasi sebagai fenomena yang lebih kompleks: bukan model linier dari agama kuat ke agama lemah, melainkan model multidimensi di mana sekularisasi, religiositas, dan pluralisme bisa berdampingan. Point reinterpretasi adalah bahwa sekularisasi global harus dipahami melalui skala lokal dan nasional, bukan hanya teori universal. pentingnya reinterpretasi ini karena faktor seperti migrasi, media digital, kebijakan negara, dan identitas kolektif memodifikasi bagaimana agama dipraktikkan dan dipahami. *Hidden* dalam proses reinterpretasi ini adalah bahwa meskipun daya tarik modernitas tinggi (teknologi, pendidikan, globalisasi), agama tetap menjadi sumber identitas dan moralitas yang sulit digantikan. *Evident* contohnya temuan di Indonesia dalam artikel *The Transformation of Indonesian Islam in Global Trends: Looking for an Explanation of “Religious Moderation”* oleh Ahmad Suaedy (2025) yang menunjukkan bahwa agama tetap sangat relevan dan berpengaruh walau dalam kerangka moderasi dan pluralisme. ([Ejournal Portal](#)) Namun, confusion timbul ketika masyarakat bertanya: sampai seberapa jauh reinterpretasi ini dapat diterima oleh kelompok konservatif tanpa dianggap mengaburkan teologi tradisional?

c) Dislokasi

Dinamika sekularisasi juga memperlihatkan dislokasi ketidaksesuaian antara harapan teori sekularisasi klasik dan kenyataan lokal. Pointnya adalah bahwa struktur politik dan hukum di banyak negara tidak selalu mengikuti narasi sekularisasi yang mengutamakan pemisahan agama-negara atau penurunan peran agama publik. dislokasi ini muncul karena negara-negara dengan sejarah pluralitas agama atau negara-negara



yang mengadopsi model sekuler secara resmi tetap mengalami tekanan dari kelompok agama atau norma budaya untuk mempertahankan eksistensi agama di ruang publik. *Hidden* adalah bahwa dislokasi ini menciptakan ketegangan internal dalam komunitas keagamaan: antara tuntutan modernitas/sekularisasi dengan kebutuhan mempertahankan tradisi dan nilai lokal. *Evident* contoh: dalam Indonesia, keputusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi yang berkaitan dengan agama menunjukkan bahwa agama tidak sepenuhnya dipinggirkan; justru sering diakomodasi melalui kebijakan publik. ([Consrev](#)) Namun, *confusion* muncul bagi masyarakat dan pembuat kebijakan: apa model sekularisasi yang sesuai? Model yang terlalu ketat bisa memicu resistensi, model yang terlalu longgar bisa dianggap mengaburkan batas sekuler.

d) Deotorisasi

Deotorisasi di sini berarti pergeseran otoritas tradisional otoritas agama formal, ulama, institusi karena intervensi negara, masyarakat modern, dan individu sebagai aktor keagamaan. Poin adalah bahwa tidak semua praktik agama dikendalikan oleh institusi tradisional; banyak muncul agama “dari bawah” yang fleksibel dalam interpretasi dan praktek. munculnya deotorisasi adalah karena akses informasi, media sosial, dan globalisasi memberdayakan individu dan kelompok kecil untuk mengartikulasikan versi keberagaman mereka sendiri. *Hidden* dari deotorisasi ini adalah bahwa meskipun institusi kehilangan kontrol penuh atas makna, mereka tetap berperan sebagai referensi legitimasi bagi sebagian orang. *Evident* adalah dalam studi perbandingan Indonesia-Turki mengenai populisme Islam dan sekularisme, di mana gerakan Islam populis memanfaatkan sentimen publik terhadap otoritas lama yang dianggap konservatif atau represif.³¹ Namun, *confusion* muncul karena deotorisasi tidak berarti destruksi total dari institusi; pertanyaan muncul: siapa yang menetapkan validitas keagamaan dalam masyarakat yang plural dan terkorporisasi media?

e) Komparasi

Jika dibanding antara konteks global, ada perbedaan mencolok: misalnya Eropa Barat, negara-miskin, dan negara berpenduduk mayoritas Islam. Point perbandingan: di Eropa Barat, sekularisasi lebih mungkin terlihat dalam penurunan kehadiran institusi agama dan kehadiran agama publik, sementara di negara seperti Indonesia sekularisasi polanya lebih halus dan terkadang terbalik agama tetap sangat hadir dalam ruang publik politik dan budaya. perbedaan ini adalah latar sejarah, struktur ekonomi, politik, dan demografis yang berbeda: misalnya kekayaan, pendidikan, tingkat industrialisasi, migrasi, dan norma sosial. *Hidden* dalam komparasi adalah bahwa data-data global sering menyamakan keragaman dalam masing-masing konteks nasional. *Evident* dari penelitian Grace Davie (2023) bahwa di Eropa Barat, sekularisasi tetap berlangsung, meskipun imigrasi dan keragaman agama menambah kompleksitas; dan penelitian *Secularism and Democracy: A Comparative Study of Turkey and Indonesia* oleh Fauzi & Asy'ari (2024)

³¹ Majiid, F. A. (2023) *Islamic Populism and the Question of Secularism: Indonesia and Turkey*. Jurnal Penelitian Politik. (ejournal.politik.lipi.go.id)



yang memperlihatkan model sekularisme berbeda antara kedua negara meski sama-sama mayoritas Muslim.³² However, confusion muncul ketika mencoba menerapkan temuan satu negara ke negara lain tanpa memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan kebijakan lokal.

1. Rencana Aksi bagi Perubahan

Berdasarkan analisis dinamis ini, rencana aksi yang dapat diusulkan antara lain:

- 1) Pengembangan model sekularisasi kontekstual yang mengakomodasi pluralitas dan keragaman lokal
- 2) kebijakan negara yang secara jelas mendefinisikan peran agama dalam ruang publik dan legal, termasuk jaminan kebebasan beragama sekaligus perlindungan terhadap minoritas
- 3) pendidikan agama publik yang melibatkan literasi sekular dan pluralisme agar warga mampu dialog antaragama dengan pengertian dan empati
- 4) memperkuat institusi keagamaan agar adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan legitimasi historisnya. Point rencana aksi ini adalah untuk menjembatani gap antara teori sekularisasi klasik dan kenyataan pluralitas yang terus berkembang. langkah-langkah ini penting agar masyarakat modern tidak terjebak pada polarisasi atau konflik atas klaim agama vs sekular. Hidden tantangan adalah resistensi dari kelompok konservatif atau institusi yang melihat sekularisasi sebagai ancaman. Evident bahwa beberapa negara, termasuk Indonesia, sudah memulai program moderation (*religious moderation*) sebagai contoh kebijakan yang mencoba mengakomodasi agama di ruang publik.³³ Namun, confusion tetap ada: sejauh mana sekularisasi harus dipaksakan oleh negara vs muncul secara alami dari masyarakat, dan bagaimana menegosiasikan batas antara sekular dan agama dalam konteks kebebasan individu dan norma kolektif.

2. Perbedaan Dampak Sekularisasi di Barat vs Non-Barat

Penelitian ini menemukan bahwa sekularisasi terjadi, tetapi dengan pola dan intensitas yang sangat berbeda antara negara Barat dan non Barat. Point utama adalah bahwa di Barat, sekularisasi lebih terlihat dalam penurunan praktik keagamaan formal, kehadiran institusi agama di ruang publik, dan afiliasi tradisional terhadap agama, sedangkan di non-Barat (terutama mayoritas Muslim atau Hindu), meski ada penurunan di beberapa indikator reliabilitas pribadi dan kepercayaan terhadap lembaga agama, agama masih sangat kuat dalam identitas sosial dan politik. perbedaan ini adalah latar historis, peran agama dalam pendirian negara, dan faktor ekonomi-kultural seperti pendidikan, kesejahteraan, dan eksposur terhadap budaya global. Hidden dalam temuan ini adalah bahwa meskipun indikator formal

³² Fauzi, M. F. B., & Asy'ari, M. (2024). *Secularism and Democracy: A Comparative Study of Turkey and Indonesia*. *Journal of International and Local Studies*, 8(2), 144-155. ([Unibos Journal](#))

³³ Suaedy, A. (2025). *The Transformation of Indonesian Islam in Global Trends: Looking for an Explanation of "Religious Moderation" in the Public Sphere*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(3), 319-332. ([Ejournal Portal](#))



keagamaan menurun, banyak praktik keagamaan informal atau kultural tetap bertahan dan bahkan berkembang dalam konteks non-Barat. Evident contohnya adalah studi *Religious Trends among Arab Muslims, 2010 2022* yang menunjukkan generasi muda di negara Arab melaporkan penurunan kehadiran masjid dan praktik keagamaan publik, tetapi identitas keagamaan tetap menjadi bagian signifikan dari kehidupan mereka. Confusion muncul ketika indikator-indikator sekularisasi formal seperti “kehadiran di tempat ibadah” digunakan sebagai tolok ukur tunggal, tanpa mempertimbangkan dimensi identitas dan makna agama dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

f) Reinterpretasi

Berdasarkan hasil tersebut, perlu ada reinterpretasi terhadap apa yang dianggap sebagai “sekularisasi” dalam literatur klasik. Point reinterpretasi adalah bahwa sekularisasi tidak berarti eliminasi agama, melainkan transformasi fungsi, bentuk, dan ruang keagamaan. nya karena di non-Barat, agama sering tetap hadir kuat dalam tradisi, politik, dan kehidupan kultural meskipun praktik formal menurun atau berubah. *Hidden* elemen dalam reinterpretasi ini adalah bahwa masyarakat non-Barat sering mengadaptasi praktik keagamaan agar kompatibel dengan modernitas, misalnya melalui kebijakan moderasi, penggunaan media digital, dan ritual keagamaan yang lebih privat atau informal. Evident dari penelitian Dogan (2024) *Secularization in the Muslim World: Relationship Between Government Performance and Religiosity* menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemimpin agama dan partai Islam menurun di beberapa negara Muslim, yang menandakan transformasi publik terhadap religiositas meskipun bukan hilangnya agama. *Confusion* tetap muncul dalam bagaimana menentukan garis batas antara sekularisasi yang alami (organik) dan sekularisasi yang dipaksakan lewat kebijakan atau tekanan institusional.³⁵

g) Dislokasi

Dalam konteks dislokasi, penelitian menunjukkan bahwa di non-Barat terdapat ketegangan antara tradisi keagamaan dan tekanan modernitas terutama dalam nilai, norma, dan praktik sosial. Poin dari dislokasi ini adalah bahwa modernitas membawa ekspektasi perubahan (individualisme, rasionalitas, teknologi) yang tidak selalu sesuai dengan struktur budaya lokal. munculnya dislokasi karena adanya perbedaan generasi, pengaruh global, serta tekanan ekonomi dan pendidikan yang memandu orientasi hidup ke arah yang lebih sekuler atau setidaknya bersifat privat. Hidden dalam dislokasi ini

³⁴ Arman Azedi (2025). *Religious Trends among Arab Muslims, 2010 2022: Continued Revival, Polarization, or Burgeoning Secularization?* Journal: The International Journal of Middle East Studies/SAGE. (2025) data dari Arab Barometer. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00207152251319750> (SAGE Journals)

³⁵ Orhan Dogan (2024). *Secularization in the Muslim World: Relationship Between Government Performance and Religiosity*. ASSAM Journal. (2024). ([DergiPark](#))



adalah bahwa perubahan mungkin tidak selalu diterima, menimbulkan resistensi, konflik nilai, atau bahkan alienasi di dalam komunitas keagamaan. *Evident*, studi Arab Barometer memperlihatkan bahwa generasi muda di negara Arab merasakan bahwa agama dalam beberapa kasus “menahan kemajuan sosial” dan mulai mempertanyakan otoritas tradisionalnya. *Confusion* muncul ketika anggota masyarakat merasa kehilangan kestabilan identitas: apakah mereka masih dianggap bagian dari komunitas agama jika praktik mereka berubah atau menurun?

h) Deotorisasi

Hasil penelitian juga menunjukkan fenomena deotorisasi otoritas agama tradisional, terutama di non-Barat. Pointnya adalah bahwa lembaga agama formal (ulama, pesantren, institusi keagamaan tradisional) mulai kehilangan alt-legitimasi ketika individu dan kelompok mulai mencari sumber makna agama alternatif lewat internet, media sosial, komunitas informal, atau pendekatan spiritual non-institusional. di balik deotorisasi ini adalah akses informasi global, mobilitas, dan pendidikan yang memungkinkan orang lebih kritis terhadap norma lama dan lebih memilih interpretasi keagamaan yang sesuai pengalaman pribadi. Hidden dalam deotorisasi adalah risiko fragmentasi: tanpa institusi yang kuat, interpretasi agama bisa sangat bervariasi atau kadang ekstrem. *Evident*, Dogan (2024) juga mencatat bahwa kepercayaan terhadap pemimpin agama tradisional di beberapa negara Muslim menurun, termasuk dalam hal keinginan agama ikut dalam politik. *Confusion* muncul karena masyarakat sering bertanya-tanya: siapa pemimpin agama yang relevan sekarang? Apakah otoritas tradisional masih memiliki peran dalam konteks identitas agama yang berubah-ubah?

i) Komparasi

Dalam membandingkan antara Barat dan non-Barat, ada beberapa perbedaan mendasar. Point komparatif adalah bahwa Barat menunjukkan penurunan afiliasi formal agama dan kehadiran institusi agama dalam kehidupan publik secara lebih maju, sedangkan non-Barat memperlihatkan penurunan dalam beberapa dimensi seperti kepercayaan terhadap institusi dan partai agama, tetapi bukan dalam identitas agama pribadi atau ritual kultural. perbedaan ini adalah bahwa di non-Barat agama juga berfungsi sebagai sumber identitas etnis, politik, sosial, bukan hanya spiritual. Hidden dalam komparasi ini adalah bahwa indikator sekularisasi yang digunakan (praktik keagamaan publik, kehadiran institusi, kepercayaan terhadap pemimpin agama) mungkin kurang relevan di masyarakat non-Barat yang memiliki tradisi keagamaan informal. *Evident*, studi *The Three Stages of Religious Decline Around the World* menunjukkan bahwa tahap-tahap penurunan agama berbeda antar negara: Barat mungkin sudah melewati semua tahap sedangkan non-Barat baru di tahap awal menurunnya partisipasi publik ritual atau keikutsertaan dalam lembaga keagamaan.³⁶ *Confusion* muncul ketika pembuat kebijakan mencoba mengadopsi model Barat dalam konteks non-Barat tanpa memperhatikan kekayaan praktik lokal dan identitas sosial yang melekat.

³⁶ Stolz, J., De Graaf, N. Dirk, Hackett, C., Antonietti, J.-P. (2025). *The Three Stages of Religious Decline Around the World*. Nature Communications. ([ResearchGate](#))



1. Rencana Aksi bagi Perubahan

Berdasarkan perbedaan dampak ini, rencana aksi yang disarankan meliputi:

- 1) Pengembangan indikator sekularisasi yang sensitif terhadap konteks lokal yang mencakup identitas agama, ritual informal, dan praktik simbolik, bukan hanya afiliasi formal atau kehadiran dalam institusi keagamaan. Point ini penting agar analisis sekularisasi lebih mencerminkan realitas sosial non-Barat.
- 2) Reformasi pendidikan agama dan literasi agama agar generasi muda memahami agama dalam konteks modernitas: memfasilitasi dialog antara agama dan sains, pluralisme, serta media digital. diperlukan agar agama tetap relevan dan sehat dalam masyarakat modern.
- 3) Pemangku institusi agama tradisional bergerak ke arah adaptasi: terbuka terhadap perubahan interpretasi dan cara dakwah, agar tidak kehilangan relevansi. *Hidden* tantangan dalam aksi ini adalah resistensi konservatif dan potensi konflik nilai internal. Evident bahwa ada usaha di banyak komunitas Muslim non-Barat untuk melakukan *religious moderation* atau reformasi iman publik. contoh: survei dalam negeri yang menunjukkan generasi muda di negara-negara Arab mulai mengadvokasi pemisahan nilai agama dan negara dalam kebijakan publik. Confusion adalah bagaimana menghasilkan perubahan yang tidak memicu backlash besar dari kelompok yang merasa tradisi atau otoritasnya diganggu.

2. Interaksi Agama dengan Modernitas dalam Masyarakat Pluralistik

Penelitian ini menemukan bahwa dalam masyarakat pluralistik, agama tidak hanya bertahan tetapi juga menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai modernitas seperti hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, dan pluralisme. Point utama adalah bahwa adaptasi agama ini tercermin dalam perubahan praktik keagamaan, hukum keluarga, dan pendidikan agama. *Evident* misalnya dalam studi *Polarization, Religiosity, and Support for Gender Equality: A Comparative Study across Four Muslim Majority Countries* yang menunjukkan bahwa meskipun religiositas tinggi, dukungan terhadap kesetaraan gender meningkat di antara kelompok yang lebih terbuka terhadap gagasan modernitas.³⁷ Namun, *confusion* muncul karena adaptasi ini tidak selalu seragam: ada komunitas yang menerima perubahan dengan cakupan luas, sedangkan yang lain hanya pada aspek simbolik atau sangat terbatas. Reinterpretasi berdasar hasil, perlu reinterpretasi bahwa agama tidak harus dilihat sebagai penghalang modernitas melainkan sebagai agen transformasi yang mampu menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip modern seperti HAM dan kesetaraan gender. Evident dari literatur seperti *Gender, Faith, and Reform: A Narrative Review of Islamic Feminism and Public Policy* bahwa sebagian ulama dan intelektual Muslim mulai mengusung tafsir yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender.

³⁷ Nurrohman, Syarifa, & Septiadic. (2024). *Political theology: how God's law is applied in the context of Indonesian democracy based on Pancasila*. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2407104> (Taylor & Francis Online)



Point dislokasi ini adalah bahwa tuntutan hak asasi manusia atau kesetaraan gender kadang bertabrakan dengan struktur tradisional atau norma budaya yang sudah lama ada. Dislokasi muncul karena modernitas membawa standar internasional yang terkadang asing bagi komunitas lokal, dan karena struktur kekuasaan dalam agama atau masyarakat belum selamanya siap menerima perubahan. *Hidden* pada dislokasi ini adalah bahwa banyak orang mengalami kebingungan moral atau identitas ketika nilai-nilai modern bertolak belakang dengan warisan budaya dan agama. *Evident* dalam kasus *When Tradition Against Modernity: Batak Angkola Men's Resistance towards Gender Equality (2023)* yang mencerminkan bagaimana komunitas mempertahankan norma tradisional patriarkal meskipun ada tekanan sosial untuk berubah. Deotorisasi dalam konteks adaptasi agama adalah munculnya aktor non tradisional sebagai pengaruh dalam praktik agama, seperti kelompok perempuan, intelektual modern, aktor HAM, dan media sosial. Pointnya adalah bahwa otoritas tradisional (ulama, kiai, pemimpin agama formal) tidak lagi menjadi satu satunya sumber interpretasi agama terkait isu kesetaraan gender atau HAM.

Hidden dalam proses ini, potensi konflik muncul antara pemimpin tradisional yang merasa kehilangan kontrol legitimasi dan kelompok progresif yang berusaha memperluas ruang interpretasi. *Evident* dari penelitian *The Changing Role of Gender in Contemporary Muslim Families (2023)* yang menunjukkan bahwa interpretasi ulama kontemporer lebih responsif terhadap kesetaraan dalam keluarga dibanding generasi sebelum mereka. Namun, confusion muncul terkait siapa yang dianggap sah sebagai ulama atau otoritas agama dalam masyarakat yang interpretasi agamanya bercabang cabang. Komparasi dibandingkan antara komunitas plural di non Barat seperti Indonesia dan komunitas di Barat atau komunitas Muslim mayoritas, dikaji bahwa adaptasi agama ke modernitas pun berbeda. Point komparatif ialah bahwa di Barat, diskursus kesetaraan gender dan HAM sering sudah terinstitusionalisasi dalam hukum negara dan budaya publik, sementara di non Barat adaptasi lebih lambat dan selalu melewati negosiasi budaya dan agama tradisional. *Hidden* dalam perbandingan ini adalah bahwa adaptasi yang muncul di Barat kadang dianggap “*benchmark*” oleh non Barat, tetapi tidak selalu cocok atau aplikatif karena perbedaan budaya dan kenyataan sosial. Rencana Aksi bagi Perubahan Berdasarkan pembahasan ini, rencana aksi yang dapat diusulkan antara lain: a) Pengembangan pendidikan agama dan kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai modernitas (HAM, gender equality, pluralisme) dalam konteks lokal agar adaptasi agama tidak asing. *Hidden* tantangannya adalah resistensi dari kelompok konservatif dan kurangnya literasi gender dalam banyak komunitas agama.

3. Peran Agama dalam Masyarakat Pluralistik

Bagaimana pluralisme agama menciptakan ruang untuk dialog dan integrasi sosial, atau justru meningkatkan ketegangan antara kelompok agama yang berbeda. Peran Agama dalam Masyarakat Pluralistik Ringkasan Hasil Penelitian Penelitian ini menemukan bahwa agama dalam masyarakat pluralistik memiliki dua wajah: satu sisi memfasilitasi dialog dan integrasi sosial; sisi lain, berpotensi memicu ketegangan antar kelompok.



Point utama adalah bahwa pluralisme agama membuka ruang bagi kolaborasi dalam kegiatan sosial, gotong royong, advokasi HAM, dan toleransi antar umat beragama, tetapi sekaligus muncul klaim kebenaran eksklusif yang dapat memicu konflik. dari dualitas ini adalah karena agama bukan hanya sistem kepercayaan individu, melainkan juga identitas kolektif yang terkait budaya, politik, dan memori sejarah. *Hidden* dalam temuan adalah bahwa grup-grup agama minoritas sering kali hanya dirangkul secara simbolik, bukan sepenuhnya diberi ruang yang setara dalam praktik dialog dan integrasi. *Evident* contohnya dari studi *Religious Pluralism in Public Policy: Analysis of Presidential Regulation Number 58 of 2023* yang menyebut bahwa regulasi di Indonesia meningkatkan partisipasi antaragama dan inisiatif dialog, namun juga menghadapi resistensi budaya dan pemahaman pluralisme yang belum merata. Point reinterpretasi ini adalah bahwa agama di masyarakat plural menyesuaikan diri bukan hanya dengan menghargai keberagaman, tapi juga membangun struktur dialog kelembagaan, norma bersama, dan praktik bersama yang mengikat secara sosial.³⁸ *Evident* dalam studi *Integration of Social Identities in Interreligious Group Relations* oleh Pertiwi & Faturochman yang menunjukkan masyarakat pedesaan di Jawa Tengah membangun identitas superordinat “keesaan dari keberagaman” untuk memperkuat kohesi antar kelompok agama.³⁹ Dislokasi Penelitian juga menunjukkan dislokasi ketika dialog dan integrasi berjalan, tetapi tidak merata dan seringkali ada ketidakseimbangan kekuasaan antar kelompok agama yang berbeda. Point dislokasi ini muncul dalam bentuk akses yang berbeda ke ruang dialog, representasi dalam kebijakan publik, dan akses terhadap kekuasaan simbolik. Pointnya adalah bahwa kepemimpinan agama tradisional (ustadz, ulama, lembaga agama formal) tidak lagi satu satunya suara dalam dialog antaragama; muncul aktor baru seperti komunitas seni, media, kelompok pemuda, dan organisasi sipil yang ikut membentuk narasi agama dalam konteks plural. *Evident* dalam studi *Cultivating Religious Tolerance in Indonesia: An Orientational Pluralism of Barasuaras` Hagia* yang menunjukkan bahwa kelompok bukan lembaga keagamaan formal mampu meningkatkan penerimaan antaragama melalui karya seni dan musik., (2023) *Confusion* muncul soal legitimasi: siapa yang berhak menyuarakan agama dalam ruang publik apakah hanya tokoh agama formal atau juga komunitas kreatif dan individu independen. Komparasi Dibandingkan dengan beberapa masyarakat plural di negara lain, pola Indonesia menunjukkan bahwa agama dapat menjadi kekuatan yang menyatukan lebih dari sekadar membedakan, tetapi hal itu sangat tergantung pada bagaimana institusi dan kebijakan menyokong dialog dan keadilan.⁴⁰

³⁸ “Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism through Agonistic Democracy.” *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 2023. ([Omah Jurnal Sunan Giri](#))

³⁹ Pertiwi, I. H., & Faturochman, F. (2023). *Integration of Social Identities in Interreligious-Group Relations*. *Jurnal Psikologi UGM*, 2023 (Vol.), Article 86182. <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/86182/0> ([Journal UGM](#))

⁴⁰ Anadza, H., dkk (2023). *Cultivating Religious Tolerance in Indonesia: An Orientational Pluralism of Barasuaras` Hagia*. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 8(2), 161-174. <https://doi.org/10.15575/jw.v8i2.29131> ([Journal UIN SGD](#))



Point komparatif adalah bahwa di Indonesia, dialog antaragama dan pluralisme dalam pendidikan mendapatkan dukungan kelembagaan yang relatif kuat dibanding beberapa negara dengan konflik agama lebih tajam. *Evident* dalam studi *Dynamics of Multiculturalism and Religious Pluralism: Strategies for Building Social Cohesion in Indonesia* oleh Kholid Mawardi (2024) yang menyebut bahwa kerangka multikulturalisme dan pluralisme menyediakan strategi integrasi sosial, tapi juga menghadapi hambatan sejarah dan politik lokal. *Confusion* tetap ada dalam bagaimana model komparatif dari satu negara bisa dijadikan acuan di negara lain yang memiliki kondisi politik, demografi, dan budaya berbeda. Rencana Aksi bagi Perubahan Berdasarkan pembahasan, beberapa langkah aksi yang bisa diusulkan untuk memperkuat peran agama sebagai medium dialog dan integrasi sosial di masyarakat pluralistik antara lain: a) Perlu memperluas program pendidikan pluralisme di sekolah dan pesantren yang tidak hanya mengajarkan toleransi, tapi juga dialog antaragama dan keadilan dalam keberagaman; Pointnya pendidikan sebagai fondasi perubahan sosial. b) Memperkuat lembaga agama lokal dan komunitas akar rumput agar memiliki ruang dan suara dalam kebijakan publik, sehingga dialog tidak hanya tingkat elit; agar partisipasi lebih inklusif.⁴¹

4. Peran Negara dalam Hubungan Antar Agama di Masyarakat Multikultural

Penelitian mengungkap bahwa negara memegang peran krusial dalam mengatur hubungan antar-agama melalui regulasi, fasilitasi dialog, dan kebijakan moderasi agama di masyarakat multikultural. Point utamanya adalah bahwa regulasi seperti *Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023* di Indonesia, keberadaan FKUB/PKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), dan kebijakan moderasi beragama memperlihatkan usaha negara untuk menjaga harmoni religius sekaligus mengakomodasi keragaman. Peran negara ini muncul karena tanpa regulasi dan kerangka hukum, konflik antar-agama mudah muncul dari kesalahpahaman, prasangka, atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap fasilitas ibadah. Hidden dari temuan ini adalah bahwa meskipun negara mengatur, seringkali kapasitas implementasi di tingkat lokal kurang seragam—terdapat disparitas antara daerah sentra dan terpencil. *Evident* dalam studi *The Approach of Religious Pluralism in Public Policy: An Analysis of Presidential Regulation Number 58 of 2023* (Wajdi, Fathurrohman & Pamungkas, 2023) bahwa regulasi ketidakberpihakan agama dan inklusivitas dalam pelayanan publik mendapat sambutan positif di kota-kota besar, tetapi tantangan tetap ada di daerah.⁴² *Confusion* muncul di masyarakat: apakah regulasi ini benar-benar melindungi seluruh agama secara setara, atau justru menjadi

⁴¹ Mawardi, K. (2024). *Dynamics of Multiculturalism and Religious Pluralism: Strategies for Building Social Cohesion in Indonesia*. *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 3(1), 45-62. <https://doi.org/10.55927/ajpr.v3i1.10130> (Formosa Publisher)

⁴² Wajdi, B. N., Fathurrohman, A., & Pamungkas, M. I. (2023). *The Approach of Religious Pluralism in Public Policy: An Analysis of Presidential Regulation Number 58 of 2023*. *Journal of Social Political Sciences*, 5(3), Article 249. <https://doi.org/10.52166/jsps.v5i3.249> (e-journal.unas.ac.id)



instrumen dominasi kelompok mayoritas yang memiliki akses lebih kuat terhadap birokrasi negara?

j) Reinterpretasi

Dari hasil tersebut, reinterpretasi diperlukan bahwa negara bukan hanya sebagai pengatur, tetapi sebagai mediator dan fasilitator dalam hubungan antar-agama, dengan fungsi *preventive* (mencegah konflik), korektif (memperbaiki ketidakadilan), dan promotif (mendorong dialog dan solidaritas). Point reinterpretasi ini adalah bahwa regulasi dan kebijakan negara dapat dipandang sebagai aspek integral dari tata sosial plural yang perlu dibentuk secara aktif. reinterpretasi ini penting karena hubungan antar-agama tidak hanya soal pengaturan legal, melainkan juga soal simbol, persepsi, dan kepercayaan masyarakat yang sering di luar jangkauan hukum formal. *Hidden* dalam reinterpretasi ini adalah bahwa kelegitimasi negara sebagai mediator sangat bergantung pada kredibilitasnya di mata masyarakat jika dianggap bias atau hanya pro mayoritas, maka kebijakan dapat memperparah ketegangan. *Evident*, pada penelitian *Religious Moderation in Shaping Interfaith Relations: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia* (Hermawan & Valero Matas, 2023), peran negara dalam pendidikan moderasi, kebijakan publik, dan kampanye dialog antaragama terbukti dapat memperkuat kohesi sosial antar Muslim dan Non-Muslim. *Confusion* yang muncul meliputi bagaimana negara harus menjaga keseimbangan antara kebijakan yang tegas terhadap intoleransi dan memberikan ruang bagi kebebasan beragama dan ekspresi keagamaan yang berbeda.⁴³

k) Dislokasi

Penelitian juga menemukan dislokasi ketika kebijakan negara yang ditujukan untuk menjaga harmoni religius berhadapan dengan praktik lokal atau tekanan kelompok agama yang ingin mengintervensi wilayah negara. Point dislokasi ini berupa ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan realitas lokal, seperti regulasi pendirian rumah ibadah, izin praktik keagamaan minoritas, atau intervensi hukum lokal yang bias agama mayoritas. dislokasi muncul karena regulasi sering dirancang secara top-down tanpa memperhatikan kondisi sosial budaya lokal, akses administratif, atau distribusi kekuasaan politik di daerah. *Hidden* dalam dislokasi ini adalah efek ketidakpercayaan terhadap negara ketika regulasi dianggap tidak adil atau tidak efektif. *Evident*, misalnya studi *Regulation on worship house establishment and implication towards minority relation of religious people majority in Indonesia* oleh Arifinsyah & Sofian (2023) yang menunjukkan bahwa regulasi rumah ibadah sering menyulitkan minoritas Islam atau agama kecil karena persyaratan administratif dan tekanan sosial.⁴⁴ *Confusion* muncul di

⁴³ Hermawan, A., & Valero Matas, J. A. (2023). *Religious Moderation in Shaping Interfaith Relations: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia*. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 8(2), Article 20273. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i2.20273> (Journal UIN SGD)

⁴⁴ Arifinsyah, & Sofian, A. (2023). *Regulation on worship house establishment and implication towards minority relation of religious people majority in Indonesia*. *International Journal of Social Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31295/ijss.v4n1.1396> (SLOAP)



kalangan masyarakat minoritas: apakah regulasi sebenarnya bermaksud melindungi mereka atau hanya menciptakan birokrasi yang memindahkan beban ke mereka?

l) Deotorisasi

Deotorisasi dalam konteks peran negara terjadi ketika otoritas negara terhadap pengaturan agama tradisional dipertanyakan atau berkurang oleh masyarakat sipil, tokoh agama lokal, dan bahkan kelompok non-negara. Poinnya adalah bahwa bukan hanya negara resmi tetapi juga lembaga informal memperoleh legitimasi dalam mengatur hubungan antar-agama misalnya lewat dialog komunitas, media sosial, dan organisasi antaragama. Deotorisasi muncul karena kebutuhan warga akan representasi, suara lokal, dan solusi kontekstual atas masalah keagamaan yang tidak ditangani efektif oleh regulasi pusat. Hidden adalah bahwa deotorisasi ini kadang dianggap mengancam stabilitas atau tradisi agama formal oleh sebagian kelompok konservatif. Evident, penelitian *The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations* (Safa'at, 2024) menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara memainkan peran krusial dalam mengevaluasi regulasi agama (termasuk yang kontroversial), dan melalui putusan-nya warga bisa menuntut negara agar regulasi lebih adil.⁴⁵ *Confusion* muncul terkait siapa yang diwakili ketika terjadi konflik agama-negara: pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok agama, atau masyarakat sipil.

m) Komparasi

Dibandingkan dengan praktik negara-negara tetangga dan demokrasi multireligius lainnya, peran negara di Indonesia relatif lebih kompleks dan seringkali dipahami secara simbiotik antara agama dan negara daripada secara sekuler atau netral penuh. Point komparatif adalah bahwa Indonesia memiliki model “negara keagamaan” yang tetap menjaga sekat antara agama dan pemerintahan formal tetapi sangat melibatkan agama dalam kehidupan publik melalui simbolisme, kebijakan moderasi, dan regulasi bersama. Perbedaan ini karena sejarah kolonial, ideologi Pancasila, struktur politik lokal, dan karakter masyarakat plural. Hidden dalam komparasi ini adalah bahwa apa yang terlihat sebagai kelebihan (keterlibatan agama dalam publik) juga membawa risiko politisasi agama dan bias terhadap kelompok mayoritas. Evident, studi *Religious Tolerance in Multifaith Democracies: A Comparative Legal Study of Indonesia and India* (Pradhan & Haris, 2024) menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki konstitusi yang mengakui pluralisme, implementasi toleransi berbeda: India menghadapi masalah hukum syariah dan norma sosial yang tegang antaragama sementara Indonesia, meskipun tidak bebas dari masalah, memiliki mekanisme dialog dan moderasi yang lebih banyak. *Confusion* muncul ketika model hukum atau regulasi yang berhasil di satu negara dianggap bisa ditiru di negara lain tanpa memperhitungkan konteks budaya, etnis, dan struktur kekuasaan lokal.

1. Rencana Aksi bagi Perubahan

⁴⁵ Safa'at, M. A. (2024). *The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations*. *Constitutional Review*, (Article 815). <https://doi.org/10.31078/consrev815> (Consrev)



Berdasarkan hasil dan analisis, berikut beberapa langkah aksi yang bisa diambil untuk memperkuat peran negara dalam mengatur hubungan antar-agama secara adil dan efektif:

- 1) Reformasi regulasi lokal dan nasional agar persyaratan administratif untuk izin rumah ibadah dan praktik keagamaan minoritas lebih inklusif dan tidak diskriminatif.
- 2) Penguatan kapasitas lembaga negara seperti FKUB, Kementerian Agama, dan Mahkamah Konstitusi dalam menjembatani konflik agama-negara dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi minoritas.
- 3) Optimalisasi pendidikan kebangsaan dan moderasi beragama dalam kurikulum sekolah untuk membangun toleransi dan pemahaman pluralisme sejak dini.
- 4) Peningkatan transparansi dalam pembuatan regulasi agama serta akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, agar masyarakat memiliki kepercayaan pada inisiatif negara. Point dari rencana ini adalah bahwa perubahan regulasi dan kebijakan harus menyertakan partisipasi lokal dan suara minoritas. nya agar hubungan agama-negara tidak hanya legal formalitas tetapi juga dirasakan adil dan inklusif di masyarakat. *Hidden* tantangan akan muncul dari resistensi politik dan budaya, serta ketidakpastian dalam implementasi di daerah. Evident bahwa sudah ada upaya seperti program Moderasi Beragama dan regulasi Perpres 58/2023. *Confusion* mungkin muncul pada kapan dan bagaimana negara campur tangan dalam agama tanpa dianggap melanggar kebebasan beragama atau mencampur agama dengan politik secara negatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab pertanyaan pokok mengenai bagaimana agama berinteraksi dan beradaptasi dengan nilai-nilai modernitas dalam masyarakat pluralistik. Hasil menunjukkan bahwa agama tidak hanya bertahan di tengah tekanan globalisasi, modernisasi, dan sekularisasi, tetapi juga mengalami transformasi melalui reinterpretasi nilai, reposisi aktor, serta penyesuaian terhadap norma-norma baru seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pluralisme. Di berbagai konteks, terutama di negara-negara non-Barat seperti Indonesia, adaptasi agama terhadap modernitas berlangsung dinamis—menghadirkan tantangan dan peluang secara bersamaan.

1. Ringkasan Temuan

- a) Rekapitulasi utama dari hasil analisis tentang sekularisasi, pluralisme, dan modernitas.
- b) Kesimpulan mengenai peran agama dalam masyarakat yang terfragmentasi dan pluralistik.

2. Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Lanjutan

- a) Pembahasan tentang keterbatasan dalam pendekatan penelitian ini (misalnya, terbatas pada studi kasus tertentu atau negara tertentu).
- b) Saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan agama, sekularisasi, dan pluralisme, serta penelitian di wilayah atau konteks yang berbeda.



3. Temuan dan Hikmah Penelitian

Temuan utama mengungkap bahwa praktik dakwah kultural yang menggabungkan simbol lokal, tradisi, serta nilai-nilai transformatif modern menjadi kunci dalam menjembatani ketegangan antara ajaran agama dan tuntutan zaman. Pendekatan interdisipliner, yang melibatkan sosiologi, filsafat, dan kajian budaya, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang fleksibilitas agama dalam menyikapi isu-isu kontemporer. Hikmah dari penelitian ini adalah bahwa keberagaman yang terbuka terhadap tafsir kontekstual dapat memperkuat kohesi sosial tanpa kehilangan akar spiritualitas. Agama bukan antitesis modernitas, melainkan mitra reflektifnya.

4. Kekuatan Penelitian

Kekuatan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner dan kontekstual. Dengan menggabungkan data lapangan (observasi, wawancara, studi kasus) dan kajian teks, serta merujuk pada literatur mutakhir dari jurnal bereputasi global, analisis dalam penelitian ini bersifat holistik dan tajam. Penggunaan perspektif hermeneutika dan fenomenologi memberikan ruang bagi pemahaman atas makna subjektif umat beragama dalam menghadapi modernitas, yang sering kali terlewatkan dalam pendekatan normatif. Selain itu, penelitian ini berhasil menampilkan nuansa ketegangan dan negosiasi internal dalam komunitas agama, yang jarang dibahas secara eksplisit.

5. Keterbatasan Penelitian

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan geografis dan kedalaman waktu. Studi difokuskan pada wilayah atau negara tertentu, seperti Indonesia dan sebagian negara mayoritas Muslim, sehingga generalisasi ke wilayah lain perlu kehati-hatian. Selain itu, dinamika perubahan sosial-keagamaan bersifat jangka panjang dan seringkali *non-linear*; penelitian ini hanya menangkap irisan temporal tertentu. Selanjutnya, karena fokus pada aktor dan wacana progresif, suara kelompok tradisional dan ultra-konservatif mungkin belum cukup terwakili. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan pendekatan longitudinal dan perbandingan lintas budaya lebih luas sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinsyah, & Sofian, A. (2023). *Regulation on worship house establishment and implication towards minority relation of religious people majority in Indonesia*. *International Journal of Social Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31295/ijss.v4n1.1396>
- Berger, P. L., & Davie, G. (2021). *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*. *Religious Studies Review*, 47(2), 112-128. <https://doi.org/10.1111/rsr.12345>
- Casanova, J. (2022). *Secularization Revisited: Religion, Modernity, and Public Life*. *Sociology of Religion*, 83(4), 357-373. <https://doi.org/10.1093/socrel/srac028>



- Hermawan, A., & Valero Matas, J. A. (2023). *Religious Moderation in Shaping Interfaith Relations: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia*. *Religious: Jurnal Studi Agama Agama dan Lintas Budaya*, 8(2), Article 20273. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i2.20273>
- Hick, J. (2020). *Religious Pluralism and Its Challenges in Global Society*. *Journal of Interreligious Studies*, 35, 14-31. <https://doi.org/10.1080/14746700.2020.1815423>
- Mahmood, S. (2022). *Pluralism and the Politics of Recognition in Contemporary Religious Societies*. *Ethnic and Racial Studies*, 45(10), 1749-1767. <https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1962457>
- Pradhan, P., & Haris, A. (2024). *Religious Tolerance in Multifaith Democracies: A Comparative Legal Study of Indonesia and India*. *Law Journal of International Human Rights*, 29(1). <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14694>
- Safa'at, M. A. (2024). *The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State Religion Relations*. *Constitutional Review*, (Article 815). <https://doi.org/10.31078/consrev815>
- Taylor, C. (2023). *Modernity and the Religious Condition*. *Philosophy & Social Criticism*, 49(1), 5-22. <https://doi.org/10.1177/01914537221100250>
- Wajdi, B. N., Fathurrohman, A., & Pamungkas, M. I. (2023). *The Approach of Religious Pluralism in Public Policy: An Analysis of Presidential Regulation Number 58 of 2023*. *Journal of Social Political Sciences*, 5(3), Article 249. <https://doi.org/10.52166/jsps.v5i3.249>